



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UIP KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOSUA SIMANUNGKALIT
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 414324

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.401.082.923

1. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/170 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Bangunan Seluas 75 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 527.082.923
3. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
4. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 104.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.075.000.000

1. MOBIL, KIJANG INNOVA V LUXURY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 437.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 183.572.976

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 173.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 100.000.000

Sub Total

Rp. 4.370.155.899

III. HUTANG

Rp. 225.376.081

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.144.779.818



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.